

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks diberbagai bidang. Krisis yang berasal dari krisis moneter telah berubah menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis politik dan menjadi *krisis multidimensi*. Pemicu utama krisis tersebut adalah mata uang baht Thailand yang kemudian berdampak menjalar (*contagion effect*) ke mata uang rupiah. Melemahnya rupiah telah mendorong investor luar negeri menarik dananyapada waktu bersamaan yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio surat-surat berharga seperti *commercial papers, promissery notes, medium-term notes*, ataupun saham dan obligasi yang menyebabkan likuiditas bank menjadi rentan.

Risiko likuiditas Menurut Darmawi (2011:17) Risiko likuiditas yaitu risiko ini yang terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah diluar perhitungan bank, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. Kesulitan yang dialami oleh perbankan tersebut semakin parah sejak adanya likuidasi 16 bank pada tanggal 1 November 1997 dan kebijakan Bank Indonesia tersebut menyebablan adanya gelombang *rush* masyarakat serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran perbankan. Akibat gelombang krisis tersebut, perbankan nasional mengalami penurunan kinerja yang sangat drastis dan umumnya bank mengalami modal negatif, kualitas

aktiva produksi (KAP) sangat buruk, kerugian yang besar dan hampir semua bank mengalami kemundurn dalam tingkat kesehatan.

Krisis ekonomi yang dialami di Indonesia dari tahun 1997-1998 ini juga ditandai dengan melemahnya nilai tukar yang menurun secara drastis. Krisis keuangan ini memang dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya seperti stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap ketidakstabilan perekonomian. Daya tahan perbankan Indonesia pada saat krisis moneter sangat rentan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi internal bank yang lemah. Ketika kondisi bank Indonesia mengalami kerentanan maka akan berdampak pada pemberian kredit yang besar-besaran sehingga dapat memicu likuiditas yang besar. Akibatnya akan menimbulkan krisis pada perbankan Indonesia.

Risiko kredit menurut Darmawi (2011:16) Risiko kredit adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman atau beban bunga. Ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank.

Latumamaerissa (2011: 143), menyatakan bahwa bank adalah lembaga yang sarat dengan risiko, diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan reputasi. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/pihak lain dalam memenuhi kewajiban dalam melunasi kredit bank. Pada aktiva pemberian kredit, baik kredit komersil maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Kondisi tersebut dapat mendorong kerentanan bank.

Apabila bank rentan terhadap risiko kredit akan maka akan memberikan dampak pada bank lain sehingga menimbulkan sistem sistemik. Hubungan antara kerentanan dalam sektor perbankan pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antara *liquid liabilities* yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan *illiquid assets* yang pada umumnya berjangka waktu panjang. Berbagai kerentanan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal tersebut di atas berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko sistemik yang mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kredit merupakan aset perbankan yang tidak likuid karena tidak dapat dialihkan menjadi tunai sampai jatuh tempo utangnya sehingga kredit memiliki risiko gagal bayar yang tinggi, kerugian tersebut akibat dari risiko yang mungkin

muncul karena penyaluran kredit harus ditanggung oleh bank itu sendiri, dalam hal ini bank tidak melibatkan nasabah dalam menanggung risiko kredit, bank hanya menerapkan sistem bunga sehingga membuat bank lebih rentan terkena kredit bermasalah, (Yulita, 2014).

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari faktor internal yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman berbahaya. Kerentanan ekonomi memberikan gambaran suatu tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi bahaya. Berdasarkan Bernanke (2013), *shock* merupakan suatu peristiwa tertentu yang memicu (membarengi) terjadinya krisis (*the proximate culture*). Sementara *vulnerability* diasosiasikan dengan kondisi (*preexisting feature*) sistem keuangan yang memperkuat (*amplify*) dan mempercepat penyebaran *shock*. Selanjutnya resiko sistemik terbentuk melalui interaksi antara *shock* dari luar dan *vulnerability* yang menjadi karakteristik dari sistem keuangan itu sendiri. *Vulnerability* merupakan karakteristik elemen sistem keuangan yang berupa simpul kerawanan yang mengamplifikasi dan mempropagasi *shock* awal sehingga berpotensi untuk memperbesar *shock* pada sistem keuangan. Terdapat dua jenis *vulnerability* dalam sistem keuangan, yakni *vulnerability* yang merupakan karakteristik dasar setiap elemen serta *vulnerability* yang muncul akibat kegiatan bisnis elemen sistem keuangan (*cumulative behavior*). Seperti penyaluran kredit yang secara terus menerus terkonsentrasi pada sektor tertentu. Secara umum identifikasi *vulnerability* dilakukan melalui *risk profiling* atas perilaku setiap elemen dalam sistem keuangan, yaitu

dengan mengukur kinerja dan elemen-elemen tersebut. Identifikasi *vulnerability* mencakup dimensi *time series* dan *cross section* dengan menggunakan pendekatan risiko sistem keuangan, yakni kredit, likuiditas, pasar dan operasional. Identifikasi *vulnerability* melalui pendekatan resiko kredit, merefleksikan risiko yang muncul dan sungsi intermediasi sitem keuangan.

Teori yang mendasari kerentanan perbankan di sisi *liabilitas* adalah teori *Prisonners' Dilemma*. Seperti diketahui hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menyebabkan penarikan dana serentak dan seketika (*rush* atau *run*). Mekanisme perilaku yang mendasari fenomena ini misalnya diteliti oleh Diamond dan Dybvig (1983). Kerentanan bank pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antara *liquid liabilities* yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan *illiquid assets* yang pada umunya berjangka waktu panjang.

Menurut Hada, Santoso dan Arianto (2003) bank sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena mereka merupakan bagian dari sistem pembayaran. Sistem perbankan sangat udah goyah karena:

1. Jumlah uang kertas sangat kecil dibandingkan dengan kewajibannya segeranya
2. Modal bank sangat rendah dibandingkan kewajibannya dan
3. Rasio dana pihak ketiga yang berjangka pendek sangat besar

Menurut Guilaumon (2007) mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan resiko kehancuran ekonomi (terhentinya pembangunan

ekonomi) yang dihadapi negara disebabkan oleh guncangan eksogen. Menurut Guilaumon ada 2 jenis guncangan eksogen atau dua sumber utama dari kerentanan, yaitu: bencana alam dan perdagangan.

Menurut Bank Indonesia, berbagai kerentanan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas yang dikhawatirkan akan menimbulkan risiko sistemik yang mengganggu stabilitas sistem perbankan Indonesia. Seperti halnya Bank Pemerintah Daerah, ketika pembiayaan dari bank yang disalurkan kepada masyarakat semakin tinggi, maka semakin besar pula peluang terjadinya kredit bermasalah, karena tidak semua dana yang disalurkan ke masyarakat dalam keadaan sehat, tapi ketika pembiayaan yang kurang baik juga memicu terjadinya kerentanan pada sistem perbankan di Bank Pemerintah Daerah. Pembiayaan yang bermasalah tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi Bank Pemerintah Daerah di Indonesia. Dampak yang timbul akibat pembiayaan yang bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut. Dimana semakin besar pembiayaan yang bermasalah pada suatu bank, maka semakin menurunkan tingkat kesehatan bank. Dengan menurunnya tingkat kesehatan bank, maka juga memicu terjadinya kerentanan yang mengarah pada krisis perbankan yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

Tabel 1.1
Daftar Bank yang ditutup tahun 1998

No.	Nama Bank
1.	Bank Pacific
2.	Sejahtera Bank Umum
3.	Bank Harapan Santosa
4.	Bank Andromeda
5.	Bank Guna International
6.	Bank Industri
7.	Bank Jakarta
8.	Southeast Asia Bank
9.	Bank Umum Majapahit
10.	Bank Pinaesaan
11.	Bank Dwipa Semesta
12.	Bank Astria Raya
13.	Bank Kosagraha Sejahtera
14.	Bank Mataram Dhanarta
15.	Bank Citrahasta Dhanamanunggal
16.	Anrico Bank Limited

Sumber : De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Dari 16 bank yang telah ditutup tersebut, BI harus menyediakan dana para deposan di bawah Rp 20 juta senilai dengan Rp 1,6 triliun. Dana ini disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan realisasi fungsi BI sebagai *lender of last resort*. Selain itu BI juga mengeluarkan dana lainnya dalam bentuk SBPU khusus pada akhir 1997 dengan tujuan membantu 28 bank yang kesulitan dalam likuiditas. Pada tanggal 8 April 1998 pemerintah telah membekuoperasikan 10 bank, yang bisa disebut Bank Beko Operasi (BBO), antarlain : Bank Surya, Bank Pelita, Bank Subentra, Bank Hokindo, Bank Istismarat, Bank Deka, Bank Centril International, Bank Umum Nasional, Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Modern. Pada tanggal 8 April 1998 13 bank telah di BTO-kan (Bank Take

Over). 13 bank yang telah di BTO-kan, yaitu : Bank Danamon, Bank Tiara Asia, PDFCI, Bank Central Asia, Bank Duta, Bank Nusa Nasional, Bank Risyad Salim Internasional, Bank Tamara, Bank Pos Nusantara, Jaya Bank International, Bank Rama, Bank Niaga, Bank Bali. Bank bank tersebut mendapatkan dana talangan berupa BLBI (Sukarman, 2014). Melalui skema Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau Master Refinancing and Notes Agreement ini untuk menyelesaikan utang yang telah dilakukan para pemilik bank. Dan enam bank yang mendapatkan dana talangan Bank Indonesia yang disebut juga BLBI tahap kedua sebesar total Rp 16.4 trilyun adalah :Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Umum Nasional, Bank Indonesia Raya, Bank Harapan Sentosa.

Krisis tahun 1997 – 1999 dialami dalam 3 fase yang mempunyai karakteristik berbeda satu dengan lainnya. Tahap awal kebijakan mengatasi kesulitan likuiditas terjadi pada Juli tahun 1997 sampai januari 1998. Tahap kebijakan lanjutan terjadi pada januari 1998 sampai meredanya fenomena bank rush pada agustus 1998. Selanjutnya, restrukturisasi perbankan nasional pada agustus 1998 hingga akhir 1999.

Dengan terjadinya krisis pada periode 1998, peran perbankan sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan banyaknya perbankan yang gagal memobilisasi dana dari masyarakat akan mengguncang sistem keuangan suatu negara. Dari beberapa pengalaman krisis yang melanda dunia, berawal dari kegagalan perbankan sehingga menciptakan

ketidakstabilan sistem keuangan. Maka dari itu untuk dapat mendeteksi sedini mungkin kemungkinan kesulitan keuangan dan kegagalan dalam dunia perbankan dapat dilakukan dengan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini tingkat kerentanan Bank Pemerintah Daerah diukur menggunakan aset, karna tujuan utama dari operasional bank adalah untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, sedangkan aset itu sendiri bisa menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan yang diperoleh dari aset yang disalurkan maka berarti bank menunjukkan seberapa baik manajerial dalam mengolah asetnya. Menurut Hanafi (2003:51), aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian. Sedangkan menurut Gill (2006:9), Aktiva (Aset) ialah uang tunai, barang dagangan, tanah, bangunan/gedung, dan peralatan atau sejenisnya yang bernilai, yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu aset penting bagi bank/perusahaan karena digunakan untuk menilai kinerja suatu bank dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi aset suatu bank, maka semakin tinggi juga tingkat laba yang didapatkan oleh bank tersebut dan semakin baik juga posisi bank tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila bank memiliki aset yang menghadapi penurunan maka bank itu bisa dianggap memiliki kinerja yang tidak buruk, karena bank dinilai tidak mampu menggunakan aset yang telah dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Yatiningsih, 2015). Maka

dari itu aset merupakan rasio yang tepat digunakan untuk mengukur kerentanan pada bank.

Pengelolaan aset ini juga diperkuat oleh surat al baqarah ayat 282 yang berbunyi:

﴿فَاذْكُوبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ أَلْفٍ مِّنْ يَّوْمٍ فَإِذَا أَمَدُوا الَّذِينَ أَيْهَأَيْهَتْهُمُ الْأَمْوَالُ لَمَّا آتَوْكُم مِّن بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَكُونُوا زَاهِدِينَ فِيهَا سَلَوَاتٍ ۚ وَلِيْلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ أَلَّا يَكُونُوا مَلَكًا مَّغْلُوبًا ۚ وَلِيْلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ أَلَّا يَكُونُوا مَلَكًا مَّغْلُوبًا ۚ وَلِيْلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ أَلَّا يَكُونُوا مَلَكًا مَّغْلُوبًا ۚ وَلِيْلَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَمْوَالِكُمْ أَلَّا يَكُونُوا مَلَكًا مَّغْلُوبًا ۚ﴾

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu beberapa variabel yang berpengaruh dalam mengukur seberapa besar kinerja bank dalam menghasilkan laba/profit. Beberapa variabel-variabel tersebut adalah variabel yang merupakan indikator dari kemampuan keuangan bank. Rasio tersebut yaitu penyaluran kredit, dana pihak ketiga, dan modal.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Semakin besar kredit yang disalurkan maka, semakin tinggi juga perolehan keuntungan yang akan didapatkan oleh bank tersebut. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012:53). Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan (Bambang, 2010). Dapat dikatakan DPK memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio aset bank. Modal ialah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan (Munawir, 2006:19). Admati et al. dalam Swamy (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi modal, semakin rendah risiko kebangkrutan bank.

Berdasarkan pada fenomena gap dan keragaman argumentasi (research gap) hasil penelitian yang telah ada mengenai kerentanan perbankan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka penulis melakukan penelitian kerentanan pada Bank Pemerintah Daerah di tahun 1998 dengan aset sebagai proxy yang diberi judul:

“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERENTANAN (*VULNERABILITY*) PADA BPD (BANK PEMBANGUNAN DAERAH) DI INDONESIA PADA KRISIS KEUANGAN ASIA TAHUN 1998”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Dalam penelitian ini pembahasan fokus kepada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode krisis Asia tahun 1998.
2. Variabel yang di gunakan untuk mengukur kerentanan pada Bank Pembangunan Daerah adalah aset, faktor-faktor yang di duga dapat mempengaruhi aset pada Bank Pemerintah Dearah diantaranya kredit, dpk dan modal.
3. Objek penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode krisis Asia tahun 1998.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Kredit terhadap *Vulnerability* saat krisis keuangan Asia tahun 1998 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Vulnerability* saat krisis keuangan Asia tahun 1998 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Modal terhadap *Vulnerability* saat krisis keuangan Asia tahun 1998 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Kredit terhadap *Vulnerability* saat krisis keuangan Asia tahun 1998 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Vulnerability* saat krisis keuangan Asia tahun 1998 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh Modal terhadap *Vulnerability* saat krisis keuangan Asia tahun 1998 pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam disiplin ilmu yang ditekuni agar kelak dapat bermanfaat bagi penulis.
2. Bagi peneliti, lain agar dapat dijadikan sebagai acuan referensi penulis lain yang dapat memberikan bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut atau yang akan datang.
3. Bagi perguruan, tinggi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan perbankan.
4. Bagi perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber informasi dan bahan masukan bagi perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke depannya.

5. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan pengambilan kebijakan.

